

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data dan Analisis

Sadi Muhamad (2015) mengemukakan bahwa Bank Syariah atau Bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan dalam kamus perbankan, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan Prinsip Syariah Islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang ditentukan oleh Al-Quran dan AlHadis.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan, “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”.

Gagasan mengenai bank syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank Islam, misalnya Anwar Qureshi pada tahun 1946, Naeim Siddiqi pada tahun 1948, dan mahmud Ahmad pada tahun 1952. Awal abad ke-20 merupakan masa kebangkitan dunia Islam dari “ketidurannya” di tengah pergolakan dunia. Kondisi ini membawa

pada kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata.

Salah satu upaya adalah dalam penerapan lembaga keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Perintisan penerapan sistem profit and loss sharing, sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah, tercatat telah ada sejak tahun 1940-an, yaitu upaya mengelola dana jama'ah haji secara nonkonvensional di Pakistan dan Malaysia. Rintisan berikutnya yang merupakan tonggak sejarah perkembangan perbankan syariah adalah Islamic Rural Bank di daerah Mit Ghamr yang didirikan oleh Dr. Ahmed el-Najar yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal pada tahun 1963 hingga 1967 di Kairo Mesir. Walaupun pada akhirnya operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt. (Dewi, 2007, hlm. 53)

Secara kolektif, gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan April 1969, yang diikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa hal yaitu:

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk Riba itu sendiri/banyak haram hukumnya.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dan sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menetapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Hal tersebut dilakukan agar sistem perbankan yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terhindar dari praktek dzhalim seperti: riba, gharar, maisir. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt berikut:

1. Ayat tentang Riba pada Q.S Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah 2:275).

2. Ayat tentang Gharar pada Q. S An-Nisa/ 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q. S An-Nisa 4:29)

3. Ayat tentang Maisir Q.S Al-Maidah/2: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Al-Maidah 5:90)

Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB), atas prakarsa sidang menteri Luar Negeri Negara OKI (Organisasi Kenferensi Islam) tahun 1970 di Pakistan, Libiya (1973), dan Jeddah (1975). Dalam sidang tersebut diusulkan penghapusan sistem keuangan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Maka berdirinya IDB memotivasi Negara Islam untuk mendirikan LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Di Asia – Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden. Untuk Islamic Development Bank berdiri tahun 1974 yang diseponsori oleh negara yang telah tergabung dalam OKI. Yang kemudian diikuti pendirian lembaga keuangan diberbagai Negara bukan OKI. Meskipun utamanya bank tersebut merupakan bank antar pemerintah dengan tujuan menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara anggotanya, IDB menyediakan layanan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasarkan pada syariah Islam.

Menurut Kasmir (1992), Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan Muslim dari berbagai negara. Salah satu negara pelopor sistem perbankan syariah secara

nasional adalah Pakistan. Hal ini ditandai dengan pemerintahan Pakistan yang mengkonversikan seluruh sistem perbankan di negaranya menjadi sistem perbankan syariah pada tahun 1985. Dan sebelumnya pada tahun 1979, beberapa institusi keuangan di Pakistan telah menghapus sistem bunga, maka pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan. (hlm. 178-179)

Berbagai laporan tentang Bank Islam, ditemukan bahwa operasi perbankan Islam dikendalikan oleh tiga prinsip dasar, yaitu (a) dihapuskannya bunga dalam segala bentuk transaksi, (b) dilakukannya segala bisnis yang sah, berdasarkan hukum serta perdagangan komersial dan perusahaan industri, serta (c) memberikan pelayanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin, sehingga bank syariah mempunyai daya tarik tersendiri bagi para nasabahnya, dan inilah yang menjadi salah satu faktor bank syariah mulai berkembang pesat di dunia Internasional. (Manan, 2002, hlm. 203)

1. Ciri-ciri Bank Syariah

Ikit (2018) mengemukakan bahwa bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah:

- a. Adanya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) setiap bank syariah yang tujuannya mengawasi sistem operasional bank syariah.
- b. Operasional bank syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah (hukum Islam).

- c. Bank Syariah menghindari dan menolak transaksi-transaksi yang dilarang dalam muamalah (balik haram zatnya, haram selain zatnya dan akad batil).
- d. Keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah dalam bentuk margin, bagi hasil, sewa menyewa dan *fee* (biaya) harus diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah.
- e. Akad yang diterapkan dan ditetapkan dalam bank syariah tidak ada unsur paksaan.
- f. Saling percaya dan amanah.

2. Tujuan Bank Syariah

Ikit (2018) mengemukakan bahwa “Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. (hlm.25). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.
- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa unggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*Perpetual Interest Effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*Unproductif Speculation*),

pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral

3. Gagasan Bank Syariah di Indonesia

Praktek perbankan di Indonesia sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syari'ah, dan juga BPR Syari'ah (BPRS). Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya

Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariah. K.H Mas Mansur, ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 menguraikan pendapatnya tentang penggunaan bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba. Kemudian disusul dengan ide umat mendirikan bank syariah di Indonesia yang sebenarnya telah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an.

Wacana ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh lembaga studi ilmu-ilmu kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini, yaitu: operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, karena hal ini tidak sejalan dengan UU pokok Perbankan yang berlaku, yaitu UU No. 14 Tahun 1967. Konsep bank syariah dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, sebagai bagian

atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, sehingga tidak dikehendaki pemerintah.

Pada pertengahan tahun 1970-an masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dengan ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia.

Upaya intensif pendirian Bank Islam (disebut oleh peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai “Bank Syariah”) di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen). (Arifin, 2002, hlm. 7)

Perdebatan Ulama dengan cendekiawan sangat luar biasa mengenai bunga bank, yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok yang menghalalkan, syubhat, dan mengharamkan. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, digelar diskusi dengan tema Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. M. Dawan Rahardjo mengajukan rekomendasi Bank Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Dalam tulisannya, jalan keluar yang direkomendasikan adalah transaksi

pembiayaan dengan tiga modus, yakni mudlârabah, musyârahah dan murâbahah.

Dari perdebatan para cendekiawan dan ulama, dilakukan uji coba skala relatif terbatas seperti Baituttanwil Salman Bandung dan lembaga serupa dalam bentuk koperasi yaitu koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa khusus mendirikan bank Islam di Indonesia dilakukan pada tahun 1990, ditandai dengan acara lokakarya bunga bank dan Perbankan di Cisarua Bogor yang diselenggarakan oleh MUI. Berdasarkan amanat Munas IV MUI hasil dari lokakarya yang dibahas pada Munas IV MUI di hotel Sahid Jaya Jakarta 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Tugas yang diemban Tim Perbankan MUI, adalah melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. (Antonio, 2001, hlm. 18)

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut. Akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, pada acara silaturahmi dengan presiden di istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan V, yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PINDAD. Selanjutnya yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan

terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia diikuti oleh perkembangan bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), namun kedua jenis bank tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat islam lapisan bawah. Oleh karena itu, dibangunlah lembaga-lembaga simpan-pinjam yang disebut Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Pada tahun 1998 muncul undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana terdapat perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan bank syariah.

4. Terbentuknya Bank Syariah Indonesia

Indonesia menduduki peran penting dalam industri perbankan syariah hal ini ditandai dengan mergernya bank BUMN Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah. Salah satu penopang utama ekonomi dan keuangan syariah di negara ini adalah perbankan syariah. Saat ini 89,26% asset lembaga keuangan syariah merupakan kontribusi dari perbankan syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB. Bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang Perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Bank Syariah Indonesia telah mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan

PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT. Bank BRISyariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan.

Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi sejarah baru bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sudah seharusnya bagi Indonesia untuk dapat menjadi Negara terdepan dalam hal perkembangan ekonomi Syariah hal ini berdasarkan mayoritas agama penduduk di Indonesia yaitu Agama Islam. Tapi, meski berlandaskan pada prinsip ekonomi dan keuangan syariah, operasional BSI tidak hanya terbuka bagi umat muslim saja, bank syariah ini dapat diikuti oleh nasabah dari berbagai kalangan.

Berdasarkan data The State of Global Islamic Economy Indicator Report 2020 menyebutkan ekonomi syariah Indonesia berada di urutan ke-4 dunia. Sepanjang tahun kinerja perbankan syariah di Indonesia stabil. Kehadiran Bank Syariah Indonesia akan memberi multiplier effect yang signifikan pada upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional pasca pandemic covid-19.

Menurut direktur PT Anugerah Mega Investama sekaligus dosen FEB Trisakti dan MET Atmajaya Hans Kwee berpendapat bahwa, merger bank syariah membawa sentiment positif untuk para pelaku usaha maupun investor di pasar saham. Merger yang sudah kuat akan melahirkan entitas yang unggul dan memiliki potensi serta membawa dampak positif bagi pemulihan ekonomi tahun ini. Entitas hasil merger BSI dapat berkontribusi pada pembiayaan

infrastruktur. Peran bank syariah akan memperluas pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan aset industri keuangan syariah mencapai 21,48% menjadi Rp 1.770,32 triliun. Jumlah ini mencakup aset yang dimiliki industri perbankan syariah sebesar Rp 593,35 triliun, pasar modal syariah Rp 1.063,81 triliun, dan industri keuangan non bank (IKNB) syariah Rp 113,16 triliun. Melihat angka-angka tersebut di tengah krisis ini dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi dan keuangan syariah telah mampu bertahan dan bisa tumbuh positif di tengah krisis ekonomi.

BSI juga diharapkan mampu menarik minat kaum milenial untuk menjadi nasabahnya, terutama dengan pemanfaatan teknologi digital. Mengingat saat ini generasi milenial tercatat populasi yang besar dalam penduduk di Indonesia.

a. Peran BSI

Menurut Dr Irfan Syauqi Beik, adapun tiga peran yang bisa dijalankan BSI, sebagai berikut:

1) Market Penetration Leader

Dalam hal ini BSI diharapkan menjadi energi yang akan menggerakkan industri perbankan syariah untuk melakukan penetrasi pasar perbankan bisa naik dari kisaran 6% saat ini. Diharapkan pangsa pasar bisa menembus angka dua digit dalam waktu 5 tahun yang akan datang.

2) Value Transmitter

Diharapkan menjadi pemancar nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah, bukan hanya pada industri perbankan saja, tapi seluruh sector perekonomian nasional karena akan mewarnai dan memperkuat ekosistem perekonomian yang sejalan dengan lima pilar yaitu *maqashid* syariah. Transformasi nilai-nilai ekonomi syariah yang bersifat inklusif diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan- permasalahan mendasar dalam perekonomian seperti kemiskinan dan kesenjangan.

3) Innovation Center

Keberadaan BSI diharapkan mampu mendorong lahirnya beragam inovasi yang akan memperkuat kualitas perbankan syariah nasional, sekaligus meningkatkan daya saing bank syariah pada level global. Harapannya, dengan adanya BSI dapat menjadi tonggak baru perekonomian Indonesia. Sebaiknya kita tidak ingin hanya menjadi follower, melainkan juga harus bisa menjadi leader dunia. Semoga dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia dapat mendorong tumbuhnya ekonomi syariah sekaligus membantu pemulihan ekonomi Pasca Pandemi.(Balqis, 2021).

B. Analisa Laba Bank Syariah Indonesia

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima bank syariah dari nasabah, di mana bank berhak mengelola dan menginvestasikan dana tersebut, dengan pembatasan jangka waktu serta ketentuan pembagian keuntungan/kerugian investasi berdasar kesepakatan. Adapun dana syirkah temporer yang dikelola BSI menggunakan akad mudharabah, di mana nasabah berstatus sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Sampai akhir kuartal I 2023, total dana syirkah temporer BSI mencapai Rp207,41 triliun, naik 4,5% (yoy). Dana itu terdiri dari giro mudharabah senilai Rp29,3 triliun, tabungan mudharabah Rp72,08 triliun, deposito mudharabah Rp103,9 triliun, sukuk mudharabah subordinasi Rp1,37 triliun, serta pembiayaan berjangka mudharabah Rp749,7 miliar. Dari seluruh dana tersebut, BSI selaku pengelola dana (mudharib) mendapat hak bagi hasil senilai Rp4,07 triliun pada kuartal I 2023, meningkat 12,4% (yoy). Pendapatan BSI dari usaha-usaha lainnya turut meningkat 21,1% (yoy) menjadi Rp985,6 miliar. Sepanjang kuartal I 2023, BSI juga membukukan pertumbuhan pembiayaan 20,15% (yoy) menjadi Rp213,3 triliun, dengan non-performing financing (NPF) bruto 2,36%.

Peningkatan laba bersih juga didorong oleh pencapaian kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 261,49 triliun, tumbuh 12,11% secara yoy. Pembiayaan yang tumbuh 21,26% secara yoy menjadi Rp 207,70 triliun. Kualitas pembiayaan yang terjaga baik tercermin dari NPF Gross di

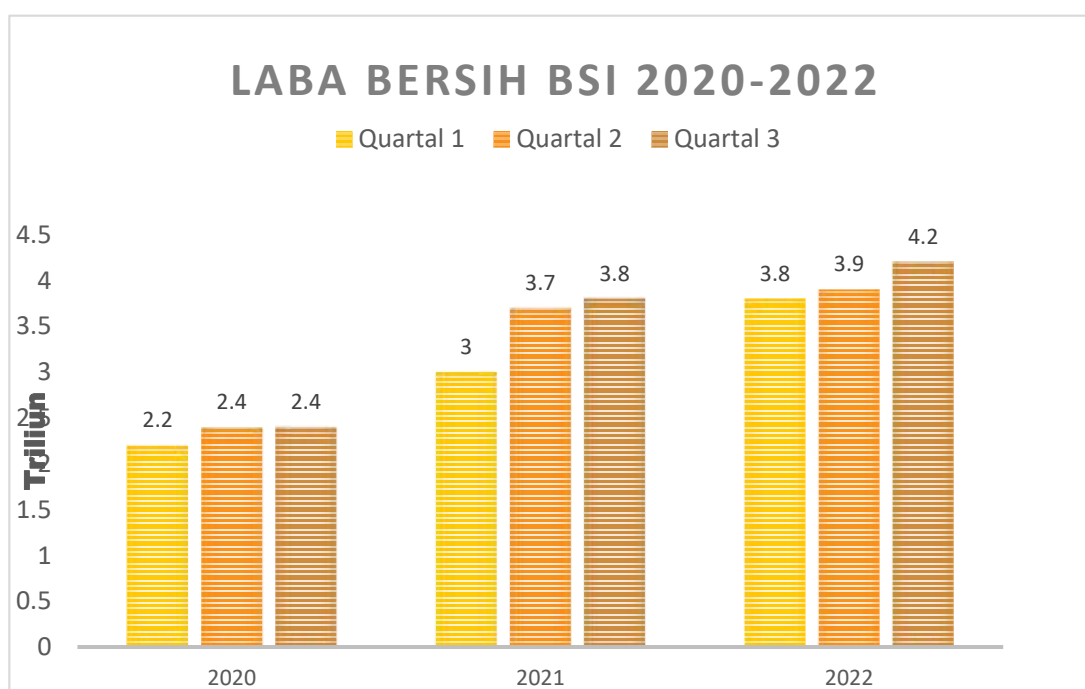
leve2,42% serta peningkatan *fee based income* BSI Mobile mencapai Rp 251 miliar, tumbuh 67% secara yoy (*year over year*).

Hingga Desember 2022, total pembiayaan BSI mencapai Rp 207,70 triliun. Dengan porsi pembiayaan yang didominasi oleh pembiayaan konsumen sebesar Rp. 106,40 triliun, tumbuh 25,94% secara yoy. Selain itu, pembiayaan wholesale sebesar Rp 57,18 triliun atau tumbuh 15,80% secara yoy dan pembiayaan mikro yang mencapai Rp 18,74 triliun, tumbuh 32,71% secara yoy. Meningkatnya pemahaman literasi keuangan syariah di Indonesia, juga menjadi pendorong pertumbuhan kinerja dan efektivitas layanan digital. Capaian ini merupakan apresiasi bagi BSI atas kepercayaan nasabah terhadap kinerja positif industri perbankan syariah di Indonesia. Dari sisi likuiditas, BSI mencatat perolehan DPK BSI mencapai Rp 261,49 triliun. Didominasi oleh tabungan wadiah mencapai Rp. 44,21 triliun dan berada di peringkat kelima tabungan secara nasional dengan jumlah nasabah BSI mencapai 17,78 juta orang.

Pencapaian ini memberikan pengaruh positif terhadap rasio *Cost of Fund* (CoF) BSI menjadi 1,62%. Rasio keuangan BSI juga solid, tumbuh, dan terintermediasi dengan baik. Terlihat dari ROE (Return of Equity) sebesar 16,84 persen dan ROA (Return of Asset) sebesar 1,98 persen. Selain itu, dari sisi biaya BSI mencatat efektivitas dan efisiensi yang tercermin dari rasio BOPO (Biaya Operasional) menjadi 75,88%.

Pertumbuhan laba Bank Syariah Indonesia secara impresif dalam periode waktu dua tahun semenjak didirikan pada 1 Februari 2021 yang merupakan hasil merger tiga Bank Syariah BUMN memberikan pengaruh besar terhadap

keuangan syariah, terlebih khusus keuangan Perbankan Syariah di Indonesia sebagaimana data yang telah tersebut di atas. Hal ini memberikan dampak positif secara umum terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, serta memperluas sektor keuangan syariah terhadap potensi keuangan syariah pada Negara Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia.



"Perusahaan fokus pada pembiayaan jangka panjang, prudent, dan mendiversifikasi alternatif pembiayaan yang sesuai segmen nasabah. Dengan demikian, risiko pembiayaan dapat dimitigasi dengan baik," kata Direktur Utama PT BSI Hery Gunardi dalam konferensi pers (27/4/2023). Kendati membukukan kinerja keuangan positif, pada pertengahan kuartal II 2023, yakni bulan Mei, layanan mobile banking BSI mengalami gangguan atau error. Gangguan tersebut membuat banyak nasabah BSI mengeluh di media sosial lantaran kesulitan

bertransaksi, hingga isu ini sempat menjadi trending topic di Twitter pada Selasa pagi (9/5/2023).

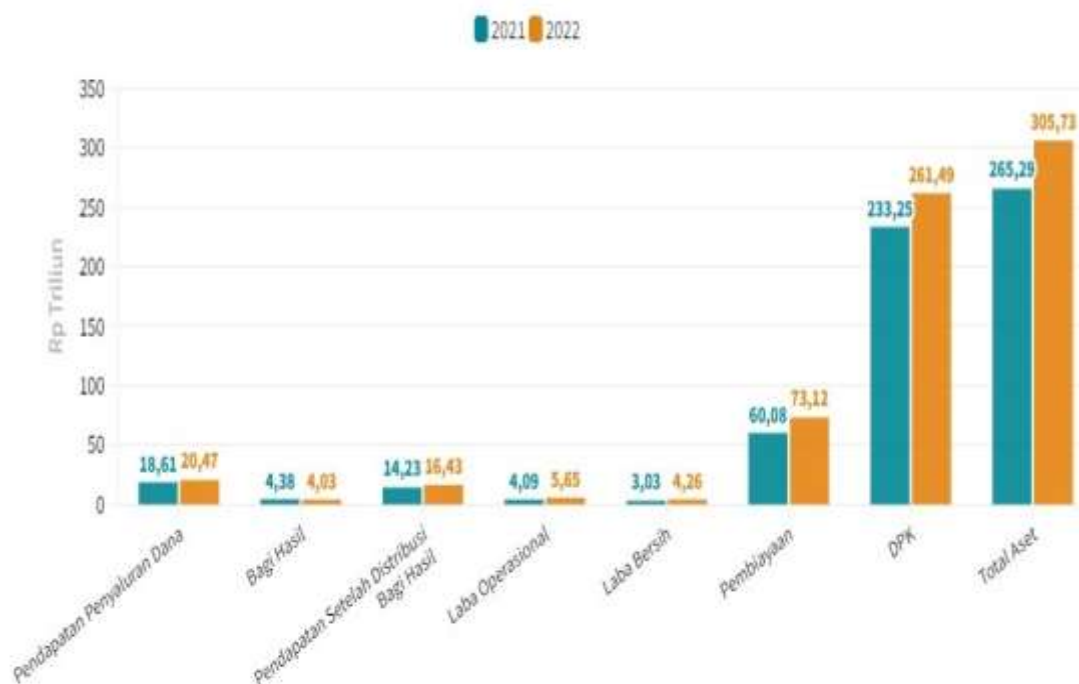
Bank Syariah Indonesia (BSI) membukukan laba bersih Rp4,26 triliun pada 2022. Capaian tersebut naik 40,68% dibanding tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*) sekaligus menjadi rekor tertinggi sejak awal keberadaannya. Nama BSI secara resmi lahir pada 1 Februari 2021. Namun, bank ini bukan sepenuhnya pendatang baru di dunia perbankan Indonesia.

Sebelumnya bank ini bernama Bank BRI Syariah yang berstatus badan usaha milik negara (BUMN). Kemudian namanya berubah menjadi BSI setelah melakukan merger dengan anak usaha bank BUMN lainnya, yakni Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah pada 2021. Adapun selama periode 2020-2022 laba BSI (sebelumnya BRI Syariah) konsisten tumbuh sekitar Rp1 triliun per tahun, seperti terlihat pada grafik. Sampai akhir 2022 total aset emiten berkode BRIS ini tumbuh 15% (yoy) menjadi Rp306 triliun. Kemudian dana pihak ketiga (DPK) BSI naik 12% (yoy) menjadi Rp261,49 triliun, dan total pembiayaannya tumbuh 21% (yoy) menjadi Rp208 triliun.

Pada akhir 2022 rasio pembiayaan bermasalah bruto atau gross non-performing financing (NPF) BSI berada di level 2,42%, turun dibanding tahun sebelumnya yang masih 2,93%. Dalam periode sama NPF netonya juga tercatat menyusut dari 0,87% menjadi 0,57%. "Dengan capaian ini, BSI berhasil naik satu peringkat menjadi bank nomor enam terbesar di Indonesia," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam siaran persnya (21/2/2023). Tahun ini BSI juga masih berada dalam indeks LQ45 periode Februari-Juli 2023.

LQ45 adalah indeks berisi 45 emiten yang dipilih Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan kriteria tertentu, seperti memiliki kapitalisasi pasar terbesar serta likuiditas tertinggi.

Data Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia TBK (BRIS)



Sumber Data: @DataIndonesia.id

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS) mencatatkan laba bersih senilai Rp4,26 triliun sepanjang 2022. Realisasi tersebut tumbuh 40,68% secara dari semula yang sebesar Rp3,03 triliun pada 2021. Pertumbuhan laba bersih tersebut ditopang oleh pendapatan penyaluran dana BSI yang turut meningkat 9,99% (yoy) menjadi Rp20,47 triliun dibandingkan sebelumnya yang senilai Rp18,61 triliun. Kenaikan pendapatan yang diraih BSI juga dibarengi dengan beban bagi hasil yang menyusut 7,92% (yoy) dari Rp4,38 triliun menjadi Rp4,03 triliun.

Oleh karena itu, BSI terpantau membukukan pendapatan setelah distribusi bagi hasil mencapai Rp16,43 triliun atau naik 15,5% (yoy) dari sebelumnya Rp14,23 triliun. Laba operasional BSI pun menanjak 38% (yoy) dari Rp4,09 triliun menjadi Rp5,65 triliun per Desember 2022. Selanjutnya pembiayaan BSI yang terdiri dari pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa tercatat sebesar Rp73,12 triliun. Angka tersebut tumbuh 21,69% dari 2021 yang senilai Rp60,08 triliun.

Kenaikan jumlah pembiayaan tersebut turut membawa aset BSI bertambah 15,24% (yoy) menjadi Rp305,73 triliun dari sebelumnya yang senilai Rp265,29 triliun. Kinerja positif emiten bank berkode saham BRIS ini juga didukung oleh penempatan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp261,49 triliun atau meningkat sebesar 12,11% secara tahunan. Sementara pada 2021, jumlah DPK BSI berada di angka Rp233,25 triliun.

Komposisi DPK BSI ditopang oleh jumlah dana murah sebesar 61,57% terhadap total DPK. Jumlah dana murah (CASA) tercatat tumbuh 19,2% menjadi Rp161,01 triliun. Peningkatan laba BSI juga terdorong oleh pendapatan berbasis komisi atau fee based income yang naik 25% dari menjadi Rp1,5 triliun pada 2022. Selain itu, BSI mencatatkan pembiayaan konsumen sebesar Rp106,40 triliun, tumbuh 25,94% pembiayaan segmen wholesale naik 15,8% menjadi sebesar Rp57,18 triliun, sementara pembiayaan mikro mencapai Rp18,74 triliun atau tumbuh 32,71%.

Februari 2021 Bank Syariah yang berada di bawah pengelolaan pemerintah atau Bank BUMN Syariah melakukan *merger*. *Merger* ini dilakukan

oleh tiga Bank Syariah yakni Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Tujuan dari merger ketiga bank ini adalah untuk meningkatkan posisi Bank Syariah di Indonesia (Rifa'i et al., 2022). Diketahui bahwa perkembangan industri keuangan Syariah saat itu masih diangka 6% (Fauzi, 2021). Sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas perbankan Syariah untuk meningkatkan pangsa pasar bank Syariah di Indonesia.

Persaingan ketat antara bank konvensional dan bank Syariah dalam menguasai pangsa pasar dapat dipengaruhi oleh kualitas perbankan tersebut. Peningkatan kualitas Perbankan Syariah di Indonesia dapat dilihat melalui laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah. Sehingga perbankan Syariah dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerja keuangan melalui laporan keuangan. Penggabungan ketiga bank mengakibatkan perubahan kualitas laporan keuangan. Peningkatan kualitas keuangan perbankan menjadi tolak ukur kinerja keuangan Lembaga keuangan (Agustian et al., 2021; Aini & Thoriq, 2020; Wijaya et al., 2022). Pengukuran tingkat kualitas keuangan bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan bank. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menganalisis setiap pos laporan keuangan sehingga dapat disimpulkan kondisi keuangan lembaga keuangan (Rininda et al., 2020; Tahirs, 2022).

Salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan adalah teknik *common size*. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan satu pos akun dengan total pos akun. Analisis *common size* membandingkan rasio setiap pos akun sehingga memberikan gambaran posisi keuangan. Analisis *common*

size dapat dilakukan pada neraca untuk mengetahui posisi aktiva seta pasiva perusahaan. Selain itu analisis *common size* pada laporan laba rugi dapat menunjukkan distribusi penjualan, biaya, serta laba perusahaan (Rifardi et al., 2019; Sari, 2021)

Tasya & Marlina (2022) menjelaskan dengan menggunakan analisis *common size* pada Bank Tabungan Negara dapat diketahui bahwa jumlah dana pihak ketiga mengalami penurunan selama 2016 hingga 2019 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020. Serta proporsi kredit mengalami fluktuasi pada setiap pos. Sedangkan penelitian Rifa'i et al. (2022) pada Bank Syariah Indonesia pasca merger menunjukkan pengelolaan keuangan yang tidak optimal ditunjukkan dengan tingkat persentase pos pada neraca dan laba rugi yang mengalami fluktuasi. Penelitian Agustian et al. (2021) mendukung hasil penelitian Rifa'i di mana berdasarkan hasil analisis *common size* pada Bank Syariah Indonesia diketahui terjadi kenaikan pada sisi aset. Selain pada sisi aset peningkatan juga terjadi pada pendapatan utamanya sisi bagi hasil.

Berbeda dengan hasil yang disampaikan oleh Sari (2021) pada penelitiannya mengenai kinerja keuangan BRI Syariah. Hasil penelitian Sari menunjukkan adanya penurunan kas dan pendapatan operasional. Penurunan kas dan pendapatan operasional ini menunjukkan penurunan kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan. Berdasarkan penelitian-penelitian di atas diketahui bahwa dengan menggunakan analisis *common size* dapat diketahui kinerja keuangan sebuah perusahaan baik bank maupun non bank. Serta hasil yang bertentangan antara penelitian Rifa'i dan Sari maka

penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah *merger*.

Analisis *common size* merupakan analisis laporan keuangan dengan membandingkan setiap pos dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah dihitung dalam bentuk presentasi yang selanjutnya akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Rifa'i et al., 2022).

Laba usaha	8,61%	16,13%	18,28%	15,50%	22,10%
Laba sebelum zakat	5,27%	11,82%	13,38%	11,10%	14,54%
Laba bersih	9,20%	16,69%	18,44%	15,85%	19,73%

Sumber: Web BSI 2023

Berdasarkan hasil analisis di atas diketahui bahwa beberapa pos pendapatan Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan jika dibandingkan total pendapatan sebelum dilakukan *merger*. Kenaikan tingkat pendapatan paling besar terjadi pada pos pendapatan jual beli yang mengalami kenaikan hampir 3 %. Pendapatan bagi hasil sebelum *merger* paling besar dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah secara aktual, namun secara persentase paling besar dimiliki oleh Bank BNI Syariah. Sedangkan pada pos pendapatan lainnya mengalami penurunan. Artinya produk lain selain jual beli mengalami penurunan minat dan produk jual beli mengalami kenaikan peminat (Rifa'i et al., 2022).

Pos beban usaha secara keseluruhan mengalami kenaikan utamanya pada pos gaji dan tunjangan. Kenaikan ini tentunya diakibatkan karena *merger* yang dilakukan artinya semakin banyak beban yang dikeluarkan karena cabang dan karyawan gabungan. Naiknya beban usaha Bank Syariah Indonesia diikuti dengan kenaikan laba perusahaan. Laba perusahaan mengalami kenaikan hampir 4% dari total laba sebelum *merger*. Kenaikan laba ini menunjukkan kenaikan

kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan liabilitas perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan terjadi kenaikan kualitas keuangan Bank Syariah setelah melakukan *merger*. Peningkatan kualitas keuangan ini dapat berdampak pada kemampuan Bank Syariah dalam memenuhi permintaan keuangan masyarakat. Peningkatan ini juga menunjukkan peran Bank Syariah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembiayaan baik konsumsi maupun kerja sama.

Berdasarkan hasil analisis *common size* dan perbandingan persentase pada laporan keuangan diketahui bahwa secara keseluruhan kemampuan Bank Syariah Indonesia setelah *merger* semakin meningkat. Ditunjukkan dengan kenaikan beberapa pos aktiva, pasiva, maupun pendapatan operasional. Namun masih terdapat penurunan pendapatan utamanya pada pos pendapatan bagi hasil dan pendapatan ijarah. Hasil analisis ini dapat dijadikan perhatian Bank Syariah Indonesia untuk lebih meningkatkan produk bagi hasil dan bisa meningkatkan pengelolaan pada produk jual beli.

C. Analisis Laba Tahun ke Tahun

Alat analisis yang dapat digunakan yaitu dengan mengukur rasio profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh (Sutrisno, 2007). Dengan menggunakan rasio ini, perusahaan dapat dengan mudah untuk mengukur keuntungan yang dapat diperoleh sehingga bisa diproyeksikan

dalam melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang.

Sedangkan menurut POJK. 03/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Akuisisi, Integrasi dan Transformasi Bank Umum. Penggabungan atau merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva, pasiva dan modal dari bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada bank yang menyerap, dalam hal ini Status badan hukum itu. penggabungan bank dihentikan demi hukum.

Menurut teori akuntansi, setelah merger dilakukan, maka ukuran perusahaan meningkat. Ini karena aset, kewajiban, dan ekuitas masing-masing perusahaan digabungkan (Krismaya & Kusumawardhana, 2021). Hal ini dapat menghilangkan persaingan dalam suatu kegiatan industri bisnis. Merger yang terjadi juga dapat menciptakan kekuatan bisnis yang barudan lebih kuat akibat penggabungan semua asset, kewajiban dan ekuitas dari perusahaan yang bergabung. Sehingga persaingan antar kompetitor akan begitu sulit.

D. Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba impresif Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.
 - a. Pertama, Bergabungnya tiga bank umum syariah milik negara, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021.

- b. Kedua, Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.
- c. Ketiga, Meningkatnya pemahaman literasi keuangan syariah di Indonesia, juga menjadi pendorong pertumbuhan kinerja dan efektivitas layanan digital.

Peningkatan laba bersih juga didorong oleh pencapaian kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 261,49 triliun, tumbuh 12,11% secara yoy.

1. Analisis Rasio Profitabilitas Sebelum dan Setelah Merger

Analisis rasio yang digunakan penulis yaitu Return Of Asset (ROA), Return Of Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM). Analisis ini dilakukan untuk menilai tingkat rasio profitabilitas BSI sebelum dan setelah dilakukannya merger atau penggabungan. Perhitungan rasio diukur menggunakan dan berdasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh perusahaan pada situs OJK maupun Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah hasil dari analisis rasio profitabilitas.

a. Analisis Rasio Profitabilitas Sebelum Merger (Periode 2021-2023)

Ketiga usaha bank syariah BUMN melakukan merger pada februari tahun 2021. Merger ini dilakukan dalam membantu pembangunan ekonomi nasional dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Berikut adalah tingkat rasio profitabilitas sebelum dilakukannya merger dari tahun 2018-2020:

Tabel 1 Presentase Return Of Asset (ROA)

Nama	2021	2022	2023
BSI	1,42%	1,82%	1,33%
BSI	0,43%	0,31%	0,81%
BSI	0,88%	1,69%	1,65%

Sumber : Web BSI 2023

Tabel 2 Presentase Return Of Equity (ROE)

Nama	2021	2022	2023
BSI	10,53%	13,54%	9,97%
BSI	2,49%	1,57%	5,03%
BSI	8,21%	15,66%	15,03%

Sumber: data diolah oleh penulis pada April 2023

Tabel 3 Presentase Net Profit Margin (NPM)
Data per Tri Wulan

NAMA	2021	2022	2023
Bank Syariah Indonesia	8,65%	6,77%	8,10%
Bank Syariah Indonesia	2,92%	4,55%	12,52%
Bank Syariah Indonesia	12,07%	6,60%	6,01%

Sumber : Web BSI 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat profitabilitas Bank BNI Syariah sebelum merger, dimana tingkat ROA dan ROE meningkat di tahun 2019. Peningkatan nilai ROA sebesar 1,82 persen pada 2019 yang merupakan peningkatan sebesar 0,4 persen dibandingkan ROA tahun sebelumnya sebesar 1,42 persen, sedangkan ROE pada 2019 sebesar 13,54 persen, meningkat sebesar 3,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,53 persen. Pertumbuhan tersebut karena kemampuan perseroan untuk meningkatkan margin keuntungan dan mengelolaperputaran aset dengan baik. Namun pada tahun 2020, ROA mengalami penurunan sebesar 1,33% dan ROE sebesar 9,97% karena kondisi perekonomian yang tidak stabil akibat peningkatan kasus Covid-19 yang tentunya berdampak pada bottom line perusahaan. Selain itu, pada tahun 2019 nilai NPM justru mengalami penurunan sebesar 6,77% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,65% pada tahun 2018 yang berarti nilai NPM mengalami penurunan sebesar 1,88%, penurunan nilai NPM tersebut disebabkan oleh pertumbuhan bank.beban dibandingkan dengan tahun 2019. bank pendapatan atau dibebani oleh biaya beban perusahaan. Pada tahun 2020, skor NPM membaik dengan peningkatan sebesar 8,10% yang berarti bank menunjukkan kemampuan perusahaan yang lebih baik dalam menghasilkan laba setelah pajak.

Berdasarkan tabel di atas, kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri selama tiga tahun sebelum merger dalam hal profitabilitas, termasuk return on assets (ROA), return on equity (ROE) dan net profit margin (NPM), yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, ROA dan ROE meningkat

sebesar 1,69%, meningkat sebesar 0,81% dibandingkan tahun sebelumnya 0,88%. ROE meningkat sebesar 15,66%, meningkat sebesar 7,45% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,21% yaitu lebih tinggi laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupee tenggelam dalam total aset dan ekuitas. Peningkatan nilai ROA dan ROE menunjukkan efisiensi perusahaan dalam penggunaan modal yang benar. Semakin tinggi nilai ROA dan ROE menunjukkan bahwa posisi perusahaan semakin kuat. Namun pada tahun 2020 nilai ROA dan ROE justru menurun, nilai ROA sebesar 1,65% lebih rendah 0,4% dibandingkan tahun 2019, nilai ROE sebesar 15,03% lebih rendah 0,63% dibandingkan tahun lalu. Nilai ROA dan ROE menurun. Kemampuan perusahaan untuk menggunakan asetnya secara menguntungkan. Selain itu, nilai NPM meningkat sebesar 12,07% pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2019-2020 yang mengalami penurunan sebesar 6,06%, peningkatan nilai NPM disebabkan oleh return yang diterima perusahaan lebih besar dari biaya yang diperhitungkan perusahaan dan sebaliknya.

Berdasarkan hasil data yang telah diolah pada tabel 1, 2 dan 3. Dapat dilihat bahwa kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia sebelum merger sebenarnya cukup stabil, hanya tertinggal dibandingkan perbankan konvensional. Dilihat dari kesehatan masing-masing bank memang tidak jauh berbeda dalam rasio profitabilitas, namun disini terlihat bahwa BNI Syariah kurang baik dalam hal pengelolaan investasi dan operasional bisnis tentang pengelolaan aktiva tetap.

$$\frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$$

$$\times 100$$

$$= \frac{4,26 - 3,26}{3,26} \times 100\%$$

$$= 0,3 \%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Laba Impresif}}{\text{PDB 2010}} \times 100\%$$

$$= \frac{305,7 \text{ T}}{6.422,9 \text{ T}} \times 100\%$$

$$= 0,47\%$$

Diketahui posisi keuangan Bank BRI Syariah ditinjau dari ROA, ROE dan NPM. Terlihat bahwa Bank BRI Syariah memiliki skor ROA, ROE dan NPM yang rendah dibandingkan dengan dua bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Hal ini mungkin dikarenakan usia Bank BRI Syariah yang terbilang cukup muda dibandingkan dengan dua bank BUMN lainnya. Alasan lainnya adalah siklus total aset yang relatif lambat membuat tindakan manajemen dalam mengelola total aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba menjadi tidak efektif. Namun pada tahun 2020, bank BRISyariah mengalami kemajuan yang ditandai dengan peningkatan ROA yang meningkat sebesar 0,81% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,31% yang berarti ROA meningkat sebesar 0,47%, diikuti dengan ROE sebesar 5,03% pada tahun perbandingan meningkat 1,57% dan 3,46% dibandingkan tahun sebelumnya dan terakhir juga nilai NPM sebesar 12,52% dibandingkan 4,55% dan 7,97% tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemampuan Bank

BRI Syariah dalam menghasilkan keuntungan yang sangat baik, terutama di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk saat terjadi Covid 19 di Indonesia.

a) Analisis Rasio Profitabilitas Sesudah Merger Tahun 2021

Berikut adalah tingkat rasio profitabilitas sesudah dilakukannya merger pada tahun 2021:

Tabel 4 Presentase Return Of Asset (ROA), Retur Of Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM)

	ROA	ROE	NPM
Bank Syariah Indonesia	1,61%	13,71%	17,00%

Sumber: Web BSI 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa meskipun Bank Syariah Indonesia baru beroperasi selama satu tahun, posisi keuangan BSI baik dan ROA, ROE dan NPM berada pada level yang ideal, namun manajemen memiliki kemauan untuk melakukan hal tersebut dengan menunjukkan bisa bersaing dengan bank lain. Persentase ROA, ROE dan NPM yang dinilai baik dipengaruhi oleh asset cycle yang cakupannya lebih luas dan dikelola dengan baik, serta dipengaruhi juga oleh besar kecilnya perusahaan.

1. Perbandingan Tingkat Rasio Profitabilitas 3 Usaha Bank Syariah BUMN Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5 yang menunjukkan perbandingan rasio profitabilitas tiga perusahaan perbankan syariah BUMN (BNIS, BRIS, BSM).

Bank Mandiri Syariah memiliki tingkat profitabilitas tertinggi. Dana Ketiga (DPK) merupakan indikasi tingginya tingkat profitabilitas Bank Mandiri Syariah. Dengan kata lain, Bank Mandiri Syariah memiliki total aset yang lebih besar dari BNI Syariah dan BRI Syariah.

Tabel 5 Perbandingan Tingkat Rasio Profitabilitas 3 Usaha Bank Syariah BUMN Tahun 2020

	Bank BNI Syariah	Bank BRI Syariah	Bank Mandiri Syariah
Returnn of Asset	1,33%	0,81%	1,65%
Return of Equaity	9,97%	5,03%	15,03%
Net Profit Marger	4,66%	3,25%	8,54%

Sumber: WEB BSI 2023

2. Evaluasi Rasio Profitabilitas (ROA, ROE, NPM) Sebelum dan Sesudah Merger

a. Return Of Asset (ROA)

Jika dilihat dari data yang terdapat pada tabel 1 dan 5 dimana dalam data tersebut kita dapat melihat perbandingan NPM sebelum dan setelah di merger. Dari data yang diolah melalui laporan keuangan yang ada, menunjukkan bahwa terdapat perbandingan tingkat rasio profitabilitas ROA sebelum dan sesudah dilakukannya merger. Pada tahun 2020 sebelum dilakukannya merger besarnya ROA dari bank BNIS, BRIS dan BSM yaitu senilai 1,33%, 0,81%, 1,65% atau rata rata hanya sekitar 1%. Sedangkan setelah dilakukannya penggabungan, BSI memperoleh ROA sekitar 1,61% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan tidak ada peningkatan yang terlalu

spesifik antara sebelum dan setelah merger dilakukan, dimana masing-masing perusahaan memiliki biaya operasional dan non operasional tersendiri jika tidak secara otomatis dilakukan merger, sehingga melihat aset yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan maka dapat dikatakan bahwa merger sebaiknya dilakukan. Pada saat merger dilakukan karena biaya yang dikeluarkan perseroan dari segala biaya akibat pelaksanaan merger lebih menguntungkan dibandingkan sebelum merger.

1) Return Of Equity (ROE)

Jika dilihat dari data yang terdapat pada tabel 2 dan 5 dimana dalam data tersebut kita dapat melihat perbandingan NPM sebelum dan setelah di merger. Dari data yang diolah melalui laporan keuangan yang ada, menunjukkan bahwa terdapat perbandingan tingkat rasio profitabilitas ROE sebelum dan sesudah dilakukannya merger. Pada tahun 2020 sebelum dilakukannya merger besarnya ROE dari bank BNIS, BRIS dan BSM yaitu senilai 9,97%, 5,03%, 15,03%. Sedangkan setelah dilakukannya penggabungan, BSI memperoleh ROE sekitar 13,71% pada tahun 2021. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa sebelum merger ada perbedaan 5% untuk bank sedangkan setelah merger itu 14%, jadi bisa kita lihat bahwa tingkat keuntungan setelah merger lebih stabil, meningkat dibandingkan sebelumnya.

2) Net Profit Margin (NPM)

Jika dilihat dari data yang terdapat pada tabel 3 dan 5 dimana dalam data tersebut kita dapat melihat perbandingan NPM sebelum dan

setelah di merger. Dari data yang diolah melalui laporan keuangan yang ada, menunjukkan bahwa terdapat perbandingan tingkat rasio profitabilitas NPM sebelum dan sesudah dilakukannya merger. Pada tahun 2020 sebelum dilakukannya merger besarnya NPM dari bank BNIS, BRIS dan BSM yaitu senilai 4,66%, 3,25%, 8,54%. Sedangkan setelah dilakukannya penggabungan, BSI memperoleh NPM sekitar 17% pada tahun 2021. Sehingga dapat kita lihat bahwa kinerja bank BRI sebelum merger lebih rendah dibandingkan kedua bank lainnya, sehingga selisihnya cukup besar, sekitar 7% dibandingkan tingkat keuntungannya. Namun setelah dilakukan merger dapat dilihat bahwa tingkat keuntungan cukup stabil dibandingkan sebelum merger.